

Pemetaan Wacana Berbasis Korpus di Media Sosial

Dian Rousta Febryanti, Ibnu Hamad, Udi Rusadi

Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430
Email: dian.rousta@ui.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v21i1.6452

Submitted: October 2022

Reviewed: August 2023

Accepted: June 2024

Abstract: *The #MeToo hashtag grew into digital activism among the Twitter users. This activity was becoming the networking space which increased the communication power and collaboration. This research using counter public and the fifth estate as a frame for thinking with a method of social media analyses and critical discourse based on corpus. The object of this research is 631,897 tweets of #MeToo from October 15, 2017 until March 31, 2020. The result shows there is no counter public through this hashtag for the Indonesian context. Nevertheless, users applied the social control for legitimacy of laws and sexual abuse legal cases.*

Keywords: #MeToo, counterpublic, Indonesia, the fifth estate, Twitter

Abstrak: *Tagar #MeToo yang viral di media sosial berkembang menjadi aktivisme digital bagi pengguna Twitter. Aktivitas ini menjadi ruang berjejaring yang meningkatkan kekuatan komunikasi dan kolaborasi. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir counterpublic dan the fifth estate dengan metode analisis jaringan media sosial dan wacana kritis berbasis korpus. Objek penelitian yakni 631.897 tweets dengan tagar #MeToo dari tanggal 15 Oktober 2017-31 Maret 2020. Hasil penelitian menunjukkan tidak terbentuk counterpublic melalui tagar ini untuk konteks Indonesia. Namun, pengguna Twitter mampu melakukan kontrol sosial (the fifth estate/pilar kelima) untuk mengawal pengesahan undang-undang dan kasus hukum terkait pelecehan seksual.*

Kata Kunci: #MeToo, counterpublic, Indonesia, pilar kelima, Twitter

Media sosial seperti *Twitter* (pada Juli 2023 berubah nama menjadi *X*) dapat dilihat sebagai bentuk *counterpublic*. Menurut Fraser (1990, h. 58-59), *counterpublic* adalah ruang bagi kelompok yang termarginalkan dalam diskusi publik dapat berkumpul, membentuk, dan menyebarkan narasinya. Dalam pandangan Fraser, ruang publik yang tercipta dari pemikiran Habermas (1991, h. 46) tidak benar-benar memberi akses yang setara untuk semua orang. Anggota kelompok marginal ternyata tidak memiliki ruang di ranah publik untuk menyuarakan dan mendiskusikan

kepentingannya tanpa pengaruh kelompok dominan.

Definisi publik didominasi oleh eksklusi ras/etnis, kelas, dan gender, seperti misalnya suara perempuan yang masih harus diperjuangkan untuk mendapatkan legitimasi oleh publik dominan. Dalam hal ini, media sosial juga memiliki potensi sebagai sumber akuntabilitas independen yang disebut sebagai pilar kelima (*the fifth estate*) (Dutton, 2009, h. 2-3). Pilar kelima bergantung pada tingkat independensi dari pihak lain layaknya pers yang dapat dikendalikan oleh negara atau kepentingan

komersial. Pilar kelima memiliki karakteristik yang mirip dengan pilar keempat, yakni menawarkan informasi yang tidak dikendalikan oleh negara. Ciri khas pilar kelima adalah tergantung pada individu-individu yang berjejaring. Jaringan yang terbentuk bersifat kolaboratif jika dibandingkan dengan pers dan lembaga lain (Dutton, 2009, h. 3).

Gerakan sosial (*social movement*) di media sosial dengan tagar *#MeToo* menjadi usaha perempuan, khususnya para penyintas pelecehan seksual, untuk menciptakan *counterpublic*. Gerakan ini dicetuskan oleh Tarana J. Burke, seorang aktivis kemanusiaan. Ali (2021) menyebutkan bahwa Tarana J. Burke mendirikan organisasi nirlaba *Just Be Inc.* pada 2006 untuk membantu korban kekerasan seksual dengan gerakan yang diberi nama *Me Too*. Gerakan ini meluas pada 2017 ketika artis Hollywood, Alyssa Milano menggunakan *hashtag #MeToo* saat menceritakan pengalaman pribadinya sebagai penyintas pelecehan seksual di tempat kerjanya (Sayej, 2017). Unggahan ini kemudian viral dan gerakan *#MeToo* pun mendapatkan perhatian ketika lebih dari 80 perempuan ikut angkat bicara soal pengalaman mereka seperti Alyssa. Melalui tagar ini, seorang produser film asal Amerika Serikat, Harvet Winstein, ditetapkan sebagai terdakwa dan mendapatkan hukuman selama 23 tahun.

Aktivisme digital dengan tagar *#MeToo* akhirnya digunakan sebagai kampanye bagi para penyintas pelecehan seksual untuk mengekspos pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami di media sosial.

Gerakan ini memiliki tujuan dan harapan untuk dapat menghukum pelaku pelecehan. Secara global, kampanye *#MeToo* telah mengubah sikap masyarakat secara radikal terhadap kekerasan seksual (Bethel, 2018, h. 1). Di Indonesia, telah ada kampanye serupa sebelum *#MeToo* yang juga viral. Para aktivis Indonesia telah meluncurkan kampanye *#MulaiBicara (#TalkAboutIt)* sebelum kampanye global *#MeToo*. Gerakan ini diinisiasi pada April 2016 oleh *Lentera Sintas Indonesia* dan diikuti oleh *Magdalene*, sebuah majalah feminis berbasis *online*. Tujuan kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan terkait kekerasan seksual masyarakat Indonesia. Setelah kampanye *#MeToo* menjadi perhatian global, Hera Diani, pendiri dan editor *Magdalene* mengatakan bahwa majalah ini telah menerima lebih banyak kiriman artikel terkait kekerasan seksual (Winarnita, 2020).

Media sosial *Twitter* menjadi ruang alternatif yang dipilih oleh para penyintas kekerasan seksual untuk membagikan pengalamannya karena adanya kegagalan institusi formal dalam mengakomodasi kepentingan mereka. Menurut Komnas Perempuan (2019) korban kekerasan seksual masih sering disalahkan (*victim blaming*), diminta pertanggungjawaban atas tindakannya, dan kejadiannya masih dianggap tabu.

Mekanisme hukum di Indonesia masih sangat terbatas untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual masih terbatas pada perkosaan dan pencabulan, padahal bentuk

pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui ucapan bahkan *online*. Para penyintas menjadi kelompok yang terbungkam oleh wacana dominan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami kampanye #MeToo sebagai bentuk *counterpublic*, 2) membuktikan fungsi pilar kelima dari *Twitter* dalam melakukan kontrol sosial, 3) mengeksplorasi wacana kampanye #MeToo di *Twitter* untuk triangulasi bukti terhadap urgensi kebijakan terkait pelecehan seksual, dan 4) memberikan wawasan baru tentang hubungan antaraktor yang terlibat dalam wacana #MeToo ini.

Sandhu dan Sandhu (2007) menyebutkan bahwa pemikiran Negt dan Kluge pada 1972 menentang pemikiran Jurgen Habermas (1962/1989). Menurut mereka, ruang publik Habermas masih bersifat eksklusif bagi kaum borjuis. Negt dan Kluge membuat ruang publik untuk kaum proletar dan dikenal sebagai *counterpublic*. Hansen (1993, h. 199) mendeskripsikan elemen-elemen penting dari *counterpublic*: 1) fokus utamanya pada pengalaman manusia, 2) ketergantungannya pada persepsi oposisi, 3) bersifat relatif dan tentatif, serta 4) mengubah konstitusi. Meskipun muncul beberapa definisi mengenai *counterpublic*, pendapat Fraser (1990) menjadi definisi yang paling terkenal.

Menurut Fraser (1990, h. 56-77), kata kunci *counterpublic* adalah: oposisi, konstitusi arena diskursif, dan dialektika yang tidak memiliki keterlibatan dengan publik lain. Komunikasi tentang

marginalisasi/pengucilan membantu pembentukan arena diskursif. Diskursif yang dimaksud tidak hanya merujuk pada bentuk pidato, bahasa tulisan, maupun percakapan, tetapi juga komunikasi visual dan bahasa/isyarat tubuh. Orang-orang yang berkomunikasi dengan sikap oposisi biasanya bertemu dan berkumpul bersama di ruang fisik. Tak hanya itu, mereka juga menciptakan komunitas terbayang (*imagined community*) melalui komunikasi *asinkronus* yang tersebar.

Brouwer (2006) menyebutkan bahwa pada tahun 1991, Margaret Zulicj dan Anne Laffon memperluas pernyataan Nancy Fraser tentang publik untuk menguji fungsi generatif dan invensional dari publik tersebut. Dow (1992, h. 140-141) mempertimbangkan konsep *counterpublic* dengan cara menggambarkan acara televisi berjudul *Designing Women* sekaligus sarjana feminis secara umum sebagai komponen dari ruang *counterpublic* feminis.

Pengembangan teori *counterpublic* yang lain dieksplorasi untuk studi retorika dengan menghubungkan pernyataan Michael Warner tentang publik (Deem, 2002, h. 850; Greene, 2002, h. 434). Studi lain menggunakan konsep *counterpublic* untuk menjelaskan penggunaan komunitas *World Wide Web* (WWW) untuk memfasilitasi aktivisme politik dan partisipasi dalam organisasi nonpemerintah oleh penduduk asli Bolivia serta digunakan sebagai alat kampanye kesadaran tentang kanker payudara (McDorman, 2001, h. 189; Pezzullo, 2003, h. 352). Teori *counterpublic* cenderung mengeksplorasi marginalisasi dan identitas sesuai fokus awal teori ini kepada

proletariat dengan menekankan pada konflik, perbedaan pendapat, argumen, kontroversi, maupun gerakan sosial.

Pilar kelima adalah kolektivitas pemikiran sipil individu yang menggunakan internet dan media sosial dengan cara meningkatkan kekuatan komunikatif mereka untuk mengimbangi kekuatan pemerintah, bisnis, industri, dan aktor atau institusi lain (Dutton, 2009, h. 22). Kemunculan internet memungkinkan terbentuknya pilar kelima karena tiap individu sebagai bagian dari masyarakat secara kritis dapat mencari informasi alternatif dan membentuk jaringan untuk mendistribusikan akuntabilitas sosial dalam bidang bisnis, industri, pemerintahan, politik, dan media. Validitas dan kredibilitas informasi yang disebar akan dapat diperbandingkan dan saling melengkapi dari berbagai sumber yang tersedia, baik media arus utama maupun alternatif, sehingga informasi lebih objektif.

Selain media sosial, web blog juga termasuk dalam kategori pilar kelima. Menurut Al-Rodhan (dalam Moyo, 2011, h. 754), situs web blog berperan sebagai pilar kelima. Pernyataan ini diungkapkan oleh peneliti Oxford University tersebut dalam bukunya *The Emergence of Blogs as a Fifth Estate and Their Security Implications*. Hal tersebut juga dikuatkan oleh penelitian Cooper (Cooper, 2006, h. 302).

Karakter pilar kelima merupakan interaksi antara jaringan individu dan institusi (Dutton, 2009, h. 5). Pilar kelima memiliki implikasi untuk mempertahankan demokrasi melalui ruang arus baru (Dutton,

2009, h. 22). Saat individu menggunakan internet, ia seperti memasuki ruang baru yang terhubung dengan orang dan tempat yang berbeda dibanding orang dan tempat yang biasa kita jumpai secara fisik. Ruang arus ini memungkinkan banyak aktor untuk mengonfigurasi ulang akses ke informasi, orang, layanan, dan teknologi. Hal ini bisa memperkuat institusi yang ada dan memungkinkan individu untuk berada di pusat jaringan mereka. Pilar kelima memungkinkan individu berjejaring menggunakan internet untuk meningkatkan akuntabilitas pilar lainnya, misalnya dengan menentang kebijakan pemerintah. Pilar kelima juga menawarkan alternatif otoritas bagi tenaga profesional dan warga negara secara umum untuk menyampaikan hasil analisis atau opini mereka.

Inti dari aktivisme digital terletak pada gerakan sosial dan organisasi yang mempromosikan penyebab gerakan sosial atau sering disebut sebagai organisasi gerakan sosial/*Social Movement Organisation* (SMO) (Zald & Ash, 1966, h. 320). Gerakan sosial telah menghasilkan revolusi yang membangun negara-negara baru dan telah mengubah adat istiadat sosial. Beberapa sarjana sepakat bahwa gerakan sosial harus memiliki identitas yang membuat mereka unik, bisa diidentifikasi, dan tujuan mereka harus eksplisit (McCarthy & Zald, 1977, h. 1224). Aktivisme digital didefinisikan sebagai aktivisme sosial yang dimediasi secara digital (Bennett & Segerberg, 2013a, h. 5-6). Aktivisme digital pada dasarnya tidak berbeda dari tindakan politik tradisional (Foot & Schneider,

2002, h. 222-244). Ketersediaan informasi politik secara luas di internet tidak benar-benar mengubah politik, tetapi hanya mencerminkan dan memperkuat *status quo* (Margolis & Resnick, 2000, h. 205-207). Beberapa penelitian baru mengungkapkan bahwa aktivisme digital secara substansial berbeda dari aktivisme tradisional (Bennett & Segerberg, 2013b, h. 114; Selander & Jarvenpaa, 2016, h. 331-332).

Terdapat beberapa perbedaan antara aktivisme tradisional dan digital. Aktivisme sebelumnya sangat bergantung pada jumlah peserta (Goodin & Tilly, 2006, h. 3-34), sementara sejumlah kecil aktivis digital dapat menciptakan dampak yang substansial melalui efisiensi yang diberikan oleh teknologi. Aktivisme digital lebih dikuasai oleh golongan muda karena cenderung lebih memiliki kemampuan teknis digital yang lebih tinggi (Spinuzzi, Bodrožić, Scaratti, & Ivaldi, 2019, h. 2). Aktivisme digital memberi kesempatan bagi orang-orang yang terpinggirkan untuk didengar secara luas dibandingkan dengan aktivisme tradisional (Schradi, 2018, h. 54; Young, 2018, h. 2-3).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Social Media Network Analysis* (SMNA) dan analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) berbasis korpus. Metode SMNA pada dasarnya ingin menggambarkan struktur dan relasi jaringan dari aktor yakni pengguna media sosial. Melalui metode ini, tergambar struktur jaringan pengguna *Twitter* terkait dengan isu pelecehan seksual melalui tagar *#MeToo*.

Percakapan *Twitter* dengan tagar *#MeToo* dianggap sebagai teks. Analisis wacana kritis berbasis korpus menggabungkan antara metode linguistik korpus dan analisis wacana kritis. Korpus yang digunakan adalah *dataset* berisi *tweet* dengan tagar *#MeToo* dengan konteks Indonesia (bahasa, lokasi, maupun topik). Data diolah menggunakan *software* analisis *AntConc* untuk menggambarkan kolokasi dan pola berulang lainnya yang berkaitan dengan kata kunci tertentu di seluruh korpus. Objek penelitian ini adalah *hashtag Twitter #MeToo*, sementara unit yang menjadi fokus penelitian adalah teks dalam *Twitter* itu sendiri (*tweet*, *retweet*, dan *reply*) dengan konteks Indonesia (baik yang berbahasa Indonesia atau tidak, menyebut kata Indonesia, maupun yang mengangkat topik Indonesia), para aktor yang terlibat, serta interaksi dari para aktor.

Data diambil melalui *dataset* Harvard University (Dataverse, 2020). Mereka melakukan *crawling* data setiap minggu mulai dari 15 Oktober 2017 hingga 31 Maret 2020. Kumpulan *tweet* pada 15 Oktober 2017 dan 10 Desember 2018 dikumpulkan dari *Historis Power Track Twitter* dan diterima melalui *Global Network of Isotopes in Precipitation* (GNIP). *Tweet* setelah 10 Desember 2018 dikumpulkan setiap minggu dari *Twitter API* (*Application Programming Interface*) melalui *Social Feed Manager* menggunakan status/metode filter *POST* dari *Twitter Stream API*. Total data yang tersedia adalah 32.071.469 *tweet* yang dipecah menjadi 33 *file*. Peneliti mengambil dua *dataset* yang mewakili total *tweet* dari tahun

2018-2020. *Dataset* kemudian dibersihkan dari duplikasi dan diambil data yang relevan dengan tagar #MeToo dengan menggunakan pemrograman *Python* sehingga terkumpul sebanyak 631.897 *tweet*. Dari hasil akhir, data kembali difilter dengan *keyword Indonesia* tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil dan mendapatkan 630 *tweet*.

HASIL

Tren Lokasi Terjadinya Wacana #MeToo

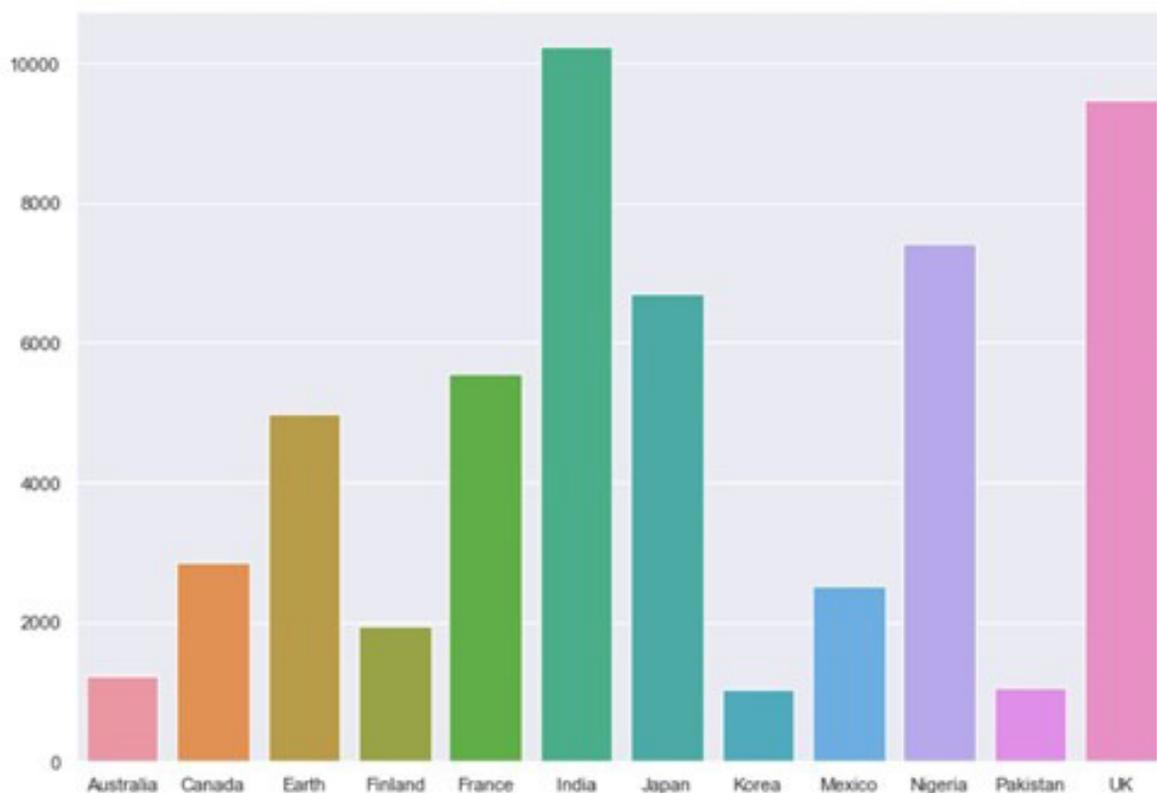
Peneliti mengolah data percakapan *Twitter* dari *dataset* dan mendapatkan visualisasi data lokasi dari pengguna *Twitter* yang terlibat percakapan dengan tagar #MeToo. Amerika menjadi negara dominan dengan perbandingan yang cukup jauh dengan negara-negara lain. Adapun negara lain yang terlibat percakapan kedua

tertinggi setelah Amerika Serikat adalah India. Perbandingannya dapat dilihat dalam Gambar 1.

Sosial Media Network Analysis (SMNA)

Tagar #MeToo ramai digunakan dan diperbincangkan secara global pada bulan Oktober 2017. Jutaan orang kemudian membagikan pengalaman pelecehan seksual yang mereka terima secara terbuka dan membagikannya dengan menggunakan tagar #MeToo. Platform media sosial *Twitter* menjadi fenomena global karena dalam waktu kurang dari sebulan terdapat *tweet* dengan tagar #MeToo lebih dari 1,7 juta kali dari 85 negara (Park, 2017).

Peneliti menggunakan *Netlytic* untuk menganalisis *dataset tweet* hingga mendapatkan gambaran jaringan seperti pada Gambar 2.



Gambar 1 Grafik Negara yang Terlibat Wacana #MeToo Selain Amerika Serikat
Sumber: Olahan Peneliti (2022)



Gambar 2 Visualisasi Jaringan #MeeToo dalam Konteks Indonesia
Sumber: Olahan Peneliti (2022)

Melalui tagar *#MeToo*, terjadi peningkatan *awareness* (kesadaran) pengguna *Twitter* di Indonesia terhadap pelecehan seksual. Pengguna *Twitter* Indonesia dalam rentang waktu ini menggunakan tagar *#MeToo* dan mengaitkannya dengan kasus Baiq Nuril Maknun yang mendapatkan ketidakadilan sebagai korban pelecehan seksual. Tagar *#MeToo* juga digunakan untuk mengangkat isu tentang jumlah pelecehan seksual yang tercatat di Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Tagar ini direspons oleh beberapa lembaga untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum, serta pendampingan oleh pemerintah kepada korban pelecehan seksual. Percakapan yang terjadi di *Twitter* dengan tagar *#MeToo*

secara umum bersifat informatif dan belum terbentuk adanya gerakan/*movement*.

Melalui analisis jaringan, diameter yang didapat berjumlah empat, artinya unggahan menyebar dari satu pengguna ke pengguna *Twitter* lain sebanyak empat tahap. Sementara itu, densitas dan resiprositasnya rendah, mendekati angka nol. Densitas rendah menunjukkan interaksi yang rendah di antara pengguna *Twitter*. Unggahan juga tidak bersifat dua arah karena resiprositas yang rendah. Pengguna *Twitter* di Indonesia lebih banyak satu arah, serta tidak menanggapi unggahan dari pengguna yang lain, ketika mengunggah *tweet* dengan tagar *#MeToo*.

Hal menarik lainnya ditunjukkan dari angka sentralisasi yang rendah dan modularitas yang relatif cukup rendah.

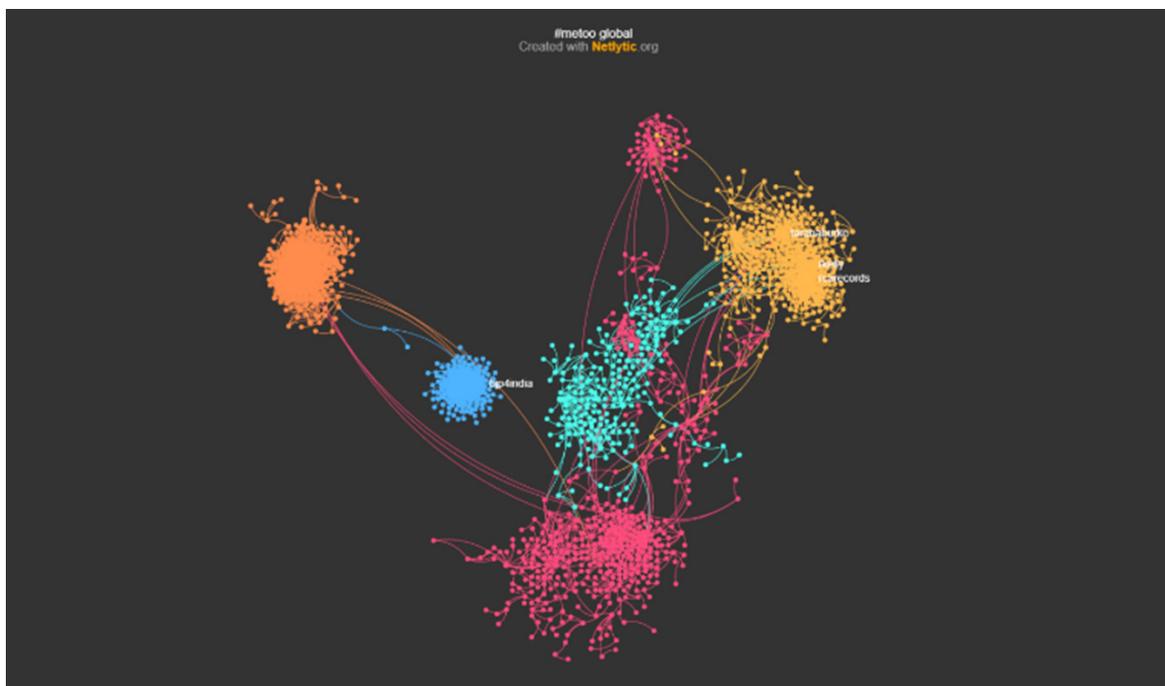
Sentralisasi yang rendah memperlihatkan tidak adanya aktor yang dominan, serta tidak ada pengguna *Twitter* yang menjadi *influencer* dalam percakapan dengan tagar *#MeToo*. Sementara itu, modularitas yang relatif tinggi menunjukkan homogenitas yang cukup kuat. Percakapan di *Twitter* dengan tagar *#MeToo* di antara pengguna Indonesia tidak bersifat menyebar. Namun uniknya, tidak ada keterhubungan antara satu klaster dengan empat klaster yang lain.

Melalui analisis dengan *software Gephi* didapatkan beberapa akun *Twitter* yang menjadi aktor dominan dalam percakapan ini. *Nodes* yang terbentuk adalah sebanyak 294 dan *edges* 241. *Nodes* mewakili individu atau aktor dan *edges* mewakili relasi yang terjadi antara aktor-aktor tersebut. Hampir semua aktor memiliki nilai *Eigenvector Centrality* yang sama (rendah), artinya tidak muncul *influencer* untuk topik dengan

tagar *#MeToo* dalam konteks Indonesia di rentang waktu Oktober 2017–Maret 2020. Hampir semua aktor membuat unggahan (*score 1 outdegree*) dan tidak ada yang *mention* aktor tersebut (*score 0 indegree*).

Perbedaan jaringan terlihat mencolok jika dibandingkan dengan konteks global. Peneliti menggunakan data sebanyak 26.803 *tweet* dari 631.897 *tweet* dari *dataset* yang tersedia. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan *software* untuk menganalisis jumlah percakapan. Jaringan yang terbentuk menggunakan *Netlytic* terlihat seperti Gambar 3.

Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, maka jaringan yang terbentuk dalam wacana *#MeToo* secara global saling terhubung antarklaster. Percakapan yang terjadi untuk konteks Indonesia kurang lebih 10 persen dari total *tweet* percakapan global yang sampelnya hanya diambil 1



Gambar 3 Visualisasi Jaringan *#MeToo* Global
Sumber: Olahan Peneliti (2022)

dari total 33 *datasets*. Percakapan *Twitter* dengan tagar *#MeToo* secara global terjadi di banyak negara dan digunakan sebagai media untuk mengungkapkan pengalaman pelecehan seksual yang dialami. Tagar *#MeToo movement* muncul dalam percakapan bersama dengan tagar *#MeToo*. Hal ini menandakan tagar *#MeToo* sudah menjadi bentuk gerakan sosial untuk mengubah struktur tertentu. Dalam konteks global, tagar ini menjadi faktor terbentuknya jaringan pengguna media sosial *Twitter* khususnya perempuan dan korban pelecehan seksual. Wacana tagar *#MeToo* global juga menentang adanya *victim blaming* bagi korban pelecehan seksual yang dinilai masih dilakukan oleh media arus utama. Hal ini seperti unggahan salah satu *tweet* di bawah ini.

#HearMeToo #metoomovement @UN_Women @16DaysZA #16DaysOfActivism match #survivor Organise by @WomenDecided Together we are stronger <https://t.co/W4eR0iuXVL>. (@margare_alex, 2019)

Berdasarkan analisis jaringan pada tagar *#MeToo* secara global, terlihat bahwa diameter yang terjadi sebesar 13 kali/tahap. Ini menunjukkan skor yang cukup tinggi, di mana jangkauan tagar ini relatif panjang, yaitu sebanyak 13 kali/tahap. Densitas dan resiprositasnya relatif mirip dengan data Indonesia yakni bernilai rendah sehingga interaksi di antara pengguna *Twitter* relatif kecil atau bersifat satu arah. Sementara itu, modularitas yang terbentuk relatif tinggi, artinya memiliki sifat homogenitas yang cukup kuat dan percakapan dengan tagar ini tidak cukup menyebar ke banyak pengguna.

Selain itu, data menunjukkan terbentuknya lima kluster dalam jaringan *#MeToo* global dan terdapat hubungan antara satu kluster dengan kluster lain.

Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus

Metode analisis wacana kritis berbasis korpus adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan wacana dengan menggunakan bantuan korpus (Ancarno, 2020, h. 165). Analisis dilakukan untuk memperlihatkan praktik diskriminasi, bias, dan ketidakadilan melalui pola penggunaan bahasa. Analisis wacana dilakukan dengan bantuan *software AntConc. Concord* (konkordansi), *keywords*, dan *wordlist* adalah tiga fungsi utama yang dirancang untuk membantu peneliti melakukan analisis linguistik. Penelitian ini memanfaatkan fungsi *concord* untuk mengumpulkan kata yang terkait dengan tagar *#MeToo*. Daftar *collocates* (kolokasi) digunakan untuk mengetahui kata-kata yang paling banyak muncul bersamaan dengan penggunaan tagar *#MeToo*.

Analisis Kolokasi

Analisis kolokasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan sebuah kata dalam korpus dan melihat kecenderungan sebuah kata muncul bersamaan dengan kata lain. Dalam analisis wacana, kata hubung seperti “dan”, “atau”, “ke”, “di”, “nya”, serta kata tunggal yang tidak memiliki arti akan dieliminasi dalam proses analisis, meskipun menduduki peringkat tertinggi dalam daftar kolokasi. Berdasarkan pengamatan pada daftar kolokasi, beberapa kata yang berkaitan dengan tagar *#MeToo* terlihat seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Analisis Kolokasi Kata #MeToo dalam Korpus

Kolokasi	Frekuensi
<i>Movement</i>	131
Gerakan	132
Momentum	120
Seks	12
Sahkanruupks	20

Sumber: Olahan Peneliti (2022)

Analisis awal dan paling sederhana adalah dengan menghitung jumlah frekuensi kata dalam korpus. Analisis ini sangat berguna karena frekuensi menunjukkan kemenonjolan sebuah kata dalam korpus (Baker, 2010, h. 113-115). Berdasarkan hasil analisis kolokasi, tagar #MeToo di Indonesia dikaitkan dengan *movement*. Dalam konteks ini, *movement* merupakan gerakan untuk meningkatkan *awareness* mengenai kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi khususnya pada perempuan (ditunjukkan oleh munculnya kata *she* dan *her* yang merujuk pada kata ganti perempuan).

Kata seks muncul sebanyak 12 kali berdasarkan analisis data. Beberapa *tweet* menggunakan tagar #MeToo mendorong para penyintas untuk berani menceritakan kasus pelecehan seksual kepada publik melalui *Twitter*. Hal ini berkaitan dengan adanya upaya untuk meningkatkan *awareness* terhadap kasus pelecehan sekaligus menciptakan ruang bagi para penyintas untuk dapat menyerukan perasaan mereka dibandingkan melaporkan kejadian tersebut. Pengguna *Twitter* merasa bahwa kasus pelecehan seksual belum mendapat perhatian serius, bahkan korban cenderung direndahkan. Hal ini terlihat dari *tweet* di

bawah ini.

Dan inilah kenapa gerakan #MeToo di Indonesia bakal susah berkembang karena pelecehan/kekerasan seksual masih dianggap kasus *enteng* dengan dalih *lu* juga keenakan *kan*. (@ASAP_Rockok, 2019)

Selain itu, terdapat 20 kali kemunculan kata *sahkanruups* yang disebutkan bersamaan dengan tagar #MeToo. Gerakan #MeToo di Indonesia juga dapat bermuatan politis karena desakan atas pengesahan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) serta diangkatnya isu terbungkamnya para korban pelecehan seksual dalam waktu lama. Hal ini seperti unggahan *tweet* di bawah ini.

I know how it felt like. Scared to death. Tried to summon your courage to shout but your voice, like many parts of your body, betrayed you that night. And after that, a part of you was dead. A part of you was mute and would stay that way for many years. #SahkanRUUPKS. (@DaraNaution, 2019)

Lima kata dominan yang muncul dari hasil kolokasi menunjukkan adanya hubungan gagasan dari tagar #MeToo di *Twitter*. Hal ini menunjukkan gerakan bagi korban pelecehan seksual dengan cara menciptakan ruang untuk menceritakan pengalamannya di ranah publik. Gerakan ini diharapkan dapat memberikan legitimasi bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dengan adanya wacana disahkannya RUU TPKS (yang saat ini sudah disahkan). Wacana tagar #MeToo menjadi ruang dan momentum bagi perempuan untuk menyuarakan pengalamannya terkait pelecehan seksual.

Namun, di sisi lain, tagar *#MeToo* menafikan kenyataan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan.

Analisis Konkordansi

Analisis konkordansi menggunakan format *Keywords in Context* (KWIC) untuk menggambarkan pola dan konteks penggunaan sebuah kata dalam korpus (Baker, 2010, h. 132). Analisis ini dilakukan untuk melihat penggunaan kata dalam konteks situasi yang berbeda. Konteks diidentifikasi dari rangkaian kata atau kalimat yang berada di sebelah kiri dan kanan dari kata yang diteliti. Analisis konkordansi juga berguna memetakan wacana dari topik tertentu dalam sebuah korpus sehingga peneliti dapat mengidentifikasi hal-hal yang dibicarakan tentang topik *#MeToo*.

Berdasarkan hasil analisis konkordansi, tagar *#MeToo* dianggap sebagai momentum munculnya sebuah gerakan sosial ketika *postingan* sebuah akun *Instagram* *@revinavt* pada tahun 2020 membuka kedok seorang psikolog yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. *Postingan* tersebut juga ramai diangkat dalam percakapan *platform* media sosial lain, termasuk *Twitter*. Sebagai sebuah *movement*, tagar *#MeToo* juga digunakan oleh pengguna *Twitter* untuk mengangkat kasus korban pelecehan Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, dan Baiq Nuril Maknun, seorang pegawai honorer sebuah SMA di Mataram. Beberapa *tweet* yang mengangkat isu tersebut di antaranya seperti terlihat di bawah ini.

Indonesia's #MeToo moment? @Jokowi to pardon sexual harassment

victim Nurul. Indonesia's parliament has unanimously approved amnesty for a woman who was jailed for documenting sexual harassment by her employer. Convicted of recording spreading indecent material under the country's electronic information; transactions law #MeToo. #Islam Baiq Nuril Maknun: #Indonesia grants amnesty to woman who recorded boss @BlissTabitha #sexualHarassment #metoo #timesup. (@metoozoo, 2019)

Indonesian Supreme Court rejects judicial review petition from teacher Baiq Nuril Maknun, convicted of defamation against school principal who sexually harassed her. The top court sentenced her to 6 months in jail; 500 million rupiah fine in 2018 #MeToo. (@DafeOputu, 2019)

Beberapa pengguna *Twitter* mengangkat isu ini untuk mendukung Baiq Nuril Maknun dengan menggunakan bahasa Inggris agar tergabung dalam wacana global terkait *#MeToo* serta *me-mention* media asing seperti *New York Times* (*@NYTimes*). Pengguna *Twitter* memiliki harapan mencuatnya wacana *#MeToo* dapat membantu terselesaikannya masalah kekerasan seksual di Indonesia. Momentum ini kemudian digunakan beberapa lembaga untuk mengadakan penyuluhan/diskusi/seminar tentang kesadaran tentang pelecehan seksual. Tagar *#MeToo* juga digunakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa fenomena pelecehan seksual bagaikan fenomena gunung es, jumlahnya banyak namun yang berani melapor hanya sedikit. Tagar *#MeToo* kemudian digunakan sebagai bentuk dukungan kepada para penyintas agar bersuara. Dari rentang waktu dua tahun *dataset* yang digunakan,

tidak banyak *tweet* dari korban pelecehan yang menyuarkan kisahnya.

It is not easy to speak up about your sexual harassment experience. But my dear @miantiara believes it is the right thing to do, and I am here to believe and support her. You have amazing soul and tremendous courage mbak. Thank you for speaking up. #MeToo. (@anindyavivi, 2019)

Tagar #MeToo digunakan oleh pengguna *Twitter* lainnya yang juga peduli pada isu kekerasan seksual. Contohnya *tweet* @anindyavivi di atas, korban melalui akun @miantiara menceritakan pengalamannya tanpa menggunakan tagar #MeToo. Namun, jika dilihat dari alur waktunya, maka dapat dikatakan bahwa si pemilik akun berani bersuara setelah tagar #MeToo mulai banyak digunakan dan berkembang menjadi aktivisme digital. Ada sebuah pandangan skeptis terhadap keberhasilan tagar #MeToo sebagai jawaban atas permasalahan pelecehan seksual.

Gerakan #MeToo bisa selesaikan kejahatan seksual? Jangan mimpi. Hanya *Khilafah* yang tuntaskan kasus-kasus pelecehan seksual. (@zidniyilma, 2019)

Dan inilah kenapa gerakan #MeToo di Indonesia bakal susah berkembang karena pelecehan/kekerasan seksual masih dianggap kasus *enteng* dengan dalih *Lu juga keenakan kan*. (@ASAP_Rokok, 2019)

Di luar masalah kekerasan seksual, tagar #MeToo juga digunakan oleh pengguna *Twitter* untuk menyuarkan penolakan terhadap RKUHP. Namun secara umum, pengguna *Twitter* di Indonesia masih membahas permasalahan yang terjadi di

Amerika dalam kerangka #MeToo seperti kasus aktor *Hollywood* Johnny Deep dan Amber Heard.

PEMBAHASAN

Gerakan #MeToo telah memberikan dampak signifikan pada ruang publik dengan menyediakan *platform* bagi individu untuk bersuara menentang pelecehan dan kekerasan seksual sehingga menentang wacana dominan mengenai isu-isu ini (Bernardini, 2021). Gerakan ini tidak hanya membawa pengalaman pribadi ke ranah publik, tetapi juga menciptakan ruang kontra publik di mana suara-suara yang terpinggirkan dapat menantang struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat terkait kekerasan seksual (Enderle, 2018). Penelitian mengenai protes gerakan #MeToo di *Twitter* dan berbahasa Jerman mengungkapkan bahwa meskipun beberapa akun media berita tradisional memainkan peran penting dalam gerakan tersebut, terdapat beberapa kelompok yang menerbitkan konten rasis dan antifeminis yang menunjukkan adanya interaksi kompleks antara feminis dan antifeminis di ruang digital (Martini, 2020).

Tagar #MeToo menjadi bentuk aktivisme digital yang mengusung semangat kesetaraan berbasis gender dan pihak yang dianggap sebagai penyintas pelecehan seksual adalah perempuan. Tujuan utama aktivisme ini adalah memperjuangkan suara para penyintas pelecehan seksual yang menjadi kelompok marginal dalam wacana media arus utama. Wacana dalam aktivisme ini adalah pelaku pelecehan seksual

yaitu laki-laki, serta mengesampingkan kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual.

Makna melecehkan juga masih ambigu karena kategori pelecehan tidak hanya interaksi tatap muka, tetapi juga interaksi *online*. Beberapa laki-laki di Amerika kemudian memilih menjaga jarak dari perempuan sejak tagar *#MeToo* viral karena mereka tidak sepenuhnya paham tindakan yang dianggap tidak pantas (Press, 2018). Pada beberapa bulan pertama setelah gerakan *#MeToo* menjadi tren, banyak pria di Amerika menyatakan sulit berpartisipasi dalam percakapan karena takut akan konsekuensi negatif, termasuk jika membagikan pendapatnya yang kontra dengan pemikiran tagar *#MeToo* (Victor, 2018).

Di sisi lain, tagar *#MeToo* berhasil menciptakan *counterpublic* bagi para penyintas pelecehan seksual untuk menyuarakan pengalamannya dan mencari keadilan, namun tidak berlaku sama di setiap negara. Gerakan sosial ini berkembang dan mampu memengaruhi kebijakan publik di Amerika Serikat di bidang industri media dan *fashion*, pendidikan, keuangan, politik dan pemerintahan, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), olahraga, militer, dan jurnalisme. Sementara itu, di negara lain gerakan *#MeToo* mengalami hambatan. Di India, meski menduduki peringkat kedua negara terbanyak yang terlibat percakapan *#MeToo*, ternyata gerakan sosial ini tidak berhasil karena adanya latar belakang budaya patriarki yang kuat. Media sosial di India sudah menjadi representasi budaya patriarki yang

dominan dan perempuan terlanjur dianggap sebagai kelompok marginal (Pain, 2021, h. 3135; Pegu, 2019, h. 160).

Kondisi serupa terjadi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana *#MeToo* tidak terlalu mendapat respons dari pengguna *Twitter* di Indonesia. Tagar ini kurang populer dibanding aktivisme digital yang sudah lebih dahulu muncul dengan tagar *#Mulaibicara*. Viralnya tagar *#MeToo* diharapkan menjadi momentum untuk menguatkan aktivisme lokal yang sudah ada sebelumnya dan lebih bersifat universal dengan jangkauan global. Namun, gerakan *#MeToo* dianggap belum mampu menciptakan *counterpublic* di Indonesia karena adanya tantangan budaya yang mengakar di masyarakat di mana kasus kekerasan atau pelecehan seksual masih dianggap tabu, keperawanan perempuan dianggap sebagai lambang kesucian, dan cenderung muncul *victim blaming* ketika terjadi kasus pelecehan seksual. Hal ini juga disebabkan masih adanya *rape culture* di Indonesia (Hidayat & Setyanto, 2020, h. 490).

Pada akhirnya, tagar *#MeToo* masih digunakan di Indonesia sebagai aktivisme berjejaring oleh aktivis yang memiliki agenda mereka sendiri, baik untuk tujuan sosial maupun politis (Parahita, 2019, h. 107). Percakapan di *Twitter* terkait *#MeToo* di Indonesia tidak digunakan oleh penyintas pelecehan seksual melainkan aktivis feminis atau lembaga-lembaga yang memberikan informasi kegiatan mereka untuk meningkatkan *awareness* tentang pelecehan seksual. Penggunaan tagar *#MeToo* di Indonesia telah mendorong

terjadinya perusakan reputasi seseorang yang dituduh melakukan tindakan pelecehan, sementara tuduhan tersebut tidak memiliki bukti kuat.

Peran *Twitter* menjadi signifikan dalam keberhasilan aktivisme digital. Aktivisme lokal akan cenderung hanya mendukung isu-isu lokal (Hamel, Lustiger-Thaler, & Mayer, 2000). Gerakan sosial bermaksud untuk mencari alternatif atau mengembangkan isu lokal menjadi global untuk mengubah sistem yang sudah bertahan (Vasconcellos & Vasconcellos, 2012, h. 244). Para pelaku gerakan sosial pada dasarnya akan memiliki tujuan untuk mengajak pemerintah melakukan perubahan melalui kebijakan publik. Layaknya fenomena saat ini, kebijakan publik yang dilakukan pemerintah bersifat lebih dinamis mengikuti respons dan reaksi masyarakat melalui aktivisme digital. Tagar *#MeToo* yang awalnya muncul dari isu lokal di Amerika berkembang menjadi isu global, serta mengaktifkan gerakan sosial terkait pelecehan seksual di berbagai negara. Aktivisme digital yang bersifat global mampu menghasilkan perubahan dalam tatanan sosial di level lokal di berbagai negara.

Melalui tagar *#MeToo*, para pengguna *Twitter* di Indonesia saling berjejaring untuk meningkatkan kekuatan komunikasi mereka. Tagar ini juga sekaligus digunakan sebagai kontrol sosial untuk mengawal disahkannya RUU TPKS yang dinilai memiliki urgensi sebagai bentuk perlindungan kepada para penyintas pelecehan seksual. Melalui tagar *#MeToo*, *Twitter* bertindak sebagai pilar kelima yang

dapat digunakan penggunaannya sebagai alat kontrol sosial. Tidak hanya itu, tagar *#MeToo* juga digunakan oleh pengguna *Twitter* di Indonesia untuk mengawal kasus hukum beberapa penyintas pelecehan seksual yang justru menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik oleh pelaku pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan masih alotnya proses peradilan yang memihak kepada korban pelecehan seksual. Penilaian tentang kredibilitas korban dalam kasus kekerasan seksual masih dipengaruhi oleh mitos dan stereotipe yang berlaku di masyarakat (Randall, 2010, h. 407). Tagar *#MeToo* sebagai aktivisme digital di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, namun universalitas *#MeToo* mampu mendorong isu-isu lokal untuk mendapat perhatian global.

SIMPULAN

Tagar *#MeToo* di media sosial *Twitter* adalah salah satu bentuk aktivisme digital. Aktivisme ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi para penyintas pelecehan seksual yang menjadi kelompok marginal. Aktivisme ini terjadi secara global dan berpengaruh di Indonesia. Tagar *#MeToo* berhasil menyuarakan pengalaman para penyintas pelecehan seksual untuk menuntut keadilan serta menguak pelaku pelecehan yang selama ini tidak mendapatkan konsekuensi hukum maupun moral.

Dalam konteks Indonesia, gerakan *#MeToo* tidak berkembang menjadi *counterpublic* bagi para penyintas pelecehan seksual, melainkan menjadi

alat aktivis atau kelompok tertentu untuk menyampaikan gagasan atau agenda mereka. Media sosial *Twitter* menjadi pilar kelima yang menyuarakan pendapat dan gagasan kelompok marginal, yakni penyintas pelecehan seksual. Tagar *#MeToo* juga membentuk solidaritas dan jaringan di antara aktivis untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan proses hukum terkait kasus kekerasan seksual. Tagar *#MeToo* sebagai gerakan sosial tidak lepas dari beberapa hambatan terkait *rape culture* dan *victim blaming* yang masih terjadi masyarakat Indonesia.

Penelitian mendatang dapat memberikan gambaran terkait tagar *#MeToo* di Indonesia dalam konteks terkini, serta menganalisis lebih jauh agar tagar ini dapat digunakan untuk kepentingan advokasi para penyintas pelecehan seksual. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan bahwa masih ada *barrier* bagi para penyintas untuk membuat aduan demi mendapatkan keadilan. Sementara itu, pelaksanaan perundangan terkait kekerasan seksual diharapkan dapat melindungi korban pelecehan seksual. Aktivisme digital yang berjejaring dan kuat diperlukan untuk gerakan yang konstruktif dalam memberi pengaruh pada pengambilan keputusan publik dan mendukung semangat demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

Ancarno, C. (2020). Corpus-assisted discourse studies. In Anna De Fina & Alexandra Georgakopoulou, *The Cambridge handbook of discourse studies*, pp. 165 – 185. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Ali, F. U. (2021, March 16). *#MeToo-Awal Mula*. *Asiawomennews.com*. <<https://www.asiawomennews.com/women-opinion/metoo-awal-mula/>>
- Baker, P. (2010). *Sociolinguistics and corpus linguistics*. Edinburgh, Skotlandia: Edinburgh University Press.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013a). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. New York, NY: Cambridge University Press.
- (2013b). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Bethel, C. (2018). *#MeToo: The perfect storm needed to change*. *Harvard Public Health Review*, 16, 1–5.
- Bernardini, V. (2021). Collective voices online: Discursive activism in *#MeToo*. In *Information Resources Management Association*, p. 724–729. Pennsylvania, Amerika: IGI Global
- Brouwer, D. C. (2006). Communication as counterpublic. In G.J. Shepherd, J. St. John, & T. Striphas (Eds.), *Communication as.....: Perspectives on theory*, h. 195-208, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cooper, S. D. (2006). Watching the watchdog: Bloggers as the fifth estate. In Stephen D Cooper, *Watching the watchdog: Bloggers as the fifth estate*, p. 277-303. Spokane, AS: Marquette Books.
- Deem, R. (2002). Talking to manager-academics: Methodological dilemmas and feminist research strategies. *Sociology*, 36(4), 835–855.
- Dow, B. J. (1992). Performance of feminine discourse in designing women. *Text and Performance Quarterly*, 12(2), 125–145.
- Dutton, W. H. (2009). The fifth estate emerging through the network of networks. *Prometheus*, 27(1), 1–15.
- Foot, K. A., & Schneider, S. M. (2002). Online action in campaign 2000: An exploratory analysis of the US political web sphere. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 46(2), 222–244.

- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy rethinking the public sphere. *Social Text*, 26(25), 56-80.
- Goodin, R. E., & Tilly, C. (2006). *The Oxford handbook of contextual political analysis* (Vol. 5). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Greene, R. W. (2002). Rhetorical pedagogy as a postal system: Circulating subjects through Michael Warner's publics and counterpublics. *Quarterly Journal of Speech*, 88(4), 434-443.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Massachusetts, AS: MIT press.
- Hansen, M. (1993). Unstable mixtures, dilated spheres: Negt and Kluge's the public sphere and experience, twenty years later. *Public Culture*, 5(2), 179-212.
- Dataverse, H. (2020, March 31). #metoo Digital Media Collection - Twitter Dataset. *Dataverse.harvard.edu*. <<https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/2SRSKJ>>
- Enderle, T. (2018). A rhetorical analysis of the public sphere through the # MeToo movement. *Quest: A Journal of Undergraduate Student Research*, 6(1), 52-68.
- Hamel, P., Lustiger-Thaler, H., Mayer, M. (2000). *Urban movements in a globalising world*. London, UK: Routledge.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485-492.
- Margolis, M., & Resnick, D. (2000). *Politics as usual* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Martini, F. (2020). Countering the counterpublic? The German #metoo network on twitter. Paper presented in the 21st Annual Conference of the Association of Internet Researchers Virtual Event, 27-31 October 2020. <<https://spir.aoir.org/ojs/index.php/spir/article/view/11274/9949>>
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.
- McDorman, T. F. (2001). Crafting a virtual counterpublic. *Counterpublics and the State*, 187-209.
- Moyo, L. (2011). Blogging down a dictatorship: Human rights, citizen journalists and the right to communicate in Zimbabwe. *Journalism*, 12(6), 745-760.
- Komnas Perempuan. (2019). *National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) National Human Rights Institution Independent Report on 25 Years of Implementing the Beijing Platform for Action (BPfA+25) in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan.
- Pain, P. (2021). It took me quite a long time to develop a voice: Examining feminist digital activism in the Indian # MeToo movement. *New Media & Society*, 23(11), 3139-3155.
- Parahita, G. D. (2019). The rise of Indonesian feminist activism on social media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(2), 104-115.
- Park, A. (2017). MeToo reaches 85 countries with 1.7 M tweets. *Cbsnews.com*. <<https://www.cbsnews.com/news/metoo-reaches-85-countries-with-1-7-million-tweets/>>
- Pegu, S. (2019). MeToo in India: Building revolutions from solidarities. *Decision*, 46(2), 151-168.
- Pezzullo, P. C. (2003). Resisting national breast cancer awareness month: The rhetoric of counterpublics and their cultural performances. *Quarterly Journal of Speech*, 89(4), 345-365.
- Randall, M. (2010). Sexual assault law, credibility, and ideal victims: Consent, resistance, and victim blaming. *Canadian Journal of Women and the Law*, 22(2), 397-433.
- Sandhu, A., & Sandhu, A. (2007). The counterpublic sphere. *Intellectuals and the People*, 63-78.

- Sayej, N. (2017). Alyssa Milano on the #MeToo movement: We're not going to stand for it any more'. *The Guardian.com*. <<https://www.theguardian.com/culture/2017/dec/01/alyssa-milano-mee-too-sexual-harassment-abuse>>
- Schradie, J. (2018). The digital activism gap: How class and costs shape online collective action. *Social Problems*, 65(1), 51–74.
- Selander, L., & Jarvenpaa, S. L. (2016). Digital action repertoires and transforming a social movement organization. *MIS Quarterly*, 40(2), 331–352.
- Spinuzzi, C., Bodrožić, Z., Scaratti, G., & Ivaldi, S. (2019). Coworking is about community: But what is community in coworking? *Journal of Business and Technical Communication*, 33(2), 112–140.
- Press, A. (2018, January 18). Robert redort on #MeToo movement: The role for men right now is to listen. *Usatoday.com*. <<https://www.usatoday.com/story/life/movies/2018/01/18/robert-redford-sundance-film-festival-metoo-movement/1046196001/>>
- Vasconcellos, M., & Vasconcellos, A. M. (2012). Social movement, public policy changes and partnerships building for local development. *INTERAÇÕES*, 13(2), 243-258.
- Victor, D. (2018). The #MeToo moment: I'm a straight man. Now what? *The New York Times*, 27.
- Winarnita, M. (2020, January 26). *Gerakan #MeToo Indonesia*. Insideindonesia.org. <<https://www.insideindonesia.org/gerakan-metoo-indonesia>>
- Young, A. G. (2018). Using ICT for social good: Cultural identity restoration through emancipatory pedagogy. *Information Systems Journal*, 28(2), 340–358.
- Zald, M. N., & Ash, R. (1966). Social movement organizations: Growth, decay and change. *Social Forces*, 44(3), 327–341.

